

TANTANGAN DAN PELUANG OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL

Arta Tio Pratama ¹, Diya Gustiara Putri ², Mila Mayasari ³, Anas Malik M. E. Sy ⁴
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

E-Mail : artatiopratama@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the challenges, opportunities, and factors that influence the implementation of regional autonomy in supporting local economic growth. Regional autonomy provides space for local governments to manage resources independently, but faces obstacles such as limited human resource capacity, infrastructure inequality, and weak budget governance. Using a qualitative approach and descriptive-analytical design, primary data was obtained through interviews with government officials, policy experts, and communities, and secondary data from planning documents and development statistics. Thematic analysis showed key constraints such as low budget accountability and infrastructure gaps, although there are strategic opportunities through digital technology-based innovation and strengthening inter-regional cooperation. The conclusion of this study confirms that optimizing regional autonomy requires improved financial governance, human resource capacity development, and sustainability-based policies to support inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Regional Autonomy, Local Economy, Policy Innovation.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi otonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya secara mandiri, namun menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur, dan lemahnya tata kelola anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, pakar kebijakan, dan masyarakat, serta data sekunder dari dokumen perencanaan dan statistik pembangunan. Analisis tematik menunjukkan kendala utama seperti rendahnya akuntabilitas anggaran dan kesenjangan infrastruktur, meskipun terdapat peluang strategis melalui inovasi berbasis teknologi digital dan penguatan kerja sama antar daerah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi otonomi daerah membutuhkan perbaikan tata kelola keuangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan berbasis keberlanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Ekonomi Lokal, Inovasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam mendukung kemandirian ekonomi lokal, terutama di negara-negara dengan wilayah yang luas dan beragam seperti Indonesia. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah (Rizqi dkk., 2024). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola urusan ekonomi dan sosial secara mandiri. Dengan otonomi yang efektif, daerah dapat lebih responsif terhadap permasalahan lokal dan lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan (Wijayanti, 2016).

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, otonomi daerah memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah yang memiliki kewenangan lebih besar dapat memfokuskan kebijakan pada pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat (Fatahillah dkk., 2024). Misalnya, pemerintah daerah dapat mengembangkan inisiatif ekonomi hijau atau investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi pendorong penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Akan tetapi implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama yang sering dihadapi meliputi kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta ketimpangan infrastruktur antar wilayah (Sukma, 2007). Di beberapa daerah, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal dapat menghambat efektivitas otonomi, sementara di daerah lain, kurangnya pendanaan menjadi kendala dalam merealisasikan program-program pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri (Rahman dkk., 2024).

Meskipun demikian, otonomi daerah juga menghadirkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kemandirian fiskal, daerah memiliki fleksibilitas untuk menarik investasi dan mengelola sumber daya lokal secara optimal(Nasrum, 2018). Selain itu, otonomi memungkinkan daerah untuk berinovasi dalam kebijakan ekonomi, seperti pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, penguatan koperasi, atau digitalisasi pelayanan publik(Augustinah, 2019). Pemanfaatan potensi lokal ini dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan mendukung keberlanjutan sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan menjadi langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk memaksimalkan manfaat otonomi daerah(Sholikin, 2018). Dengan strategi yang tepat, otonomi dapat menjadi landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen untuk menganalisis tantangan, peluang, dan inovasi kebijakan dalam implementasi otonomi daerah(Waruwu, 2023). Data diperoleh melalui telaah berbagai dokumen resmi, seperti laporan pemerintah daerah, regulasi terkait otonomi daerah, serta hasil penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keuangan, infrastruktur, dan penerapan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika otonomi daerah tanpa melibatkan proses wawancara langsung.

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. Otonomi Daerah:

Otonomi daerah merupakan konsep desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga mereka secara mandiri, baik dari sisi administratif, fiskal, maupun politik. Desentralisasi kekuasaan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Proborini Hastuti, 2018). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti pelayanan publik, pengelolaan sumber daya lokal, dan pengembangan ekonomi.

Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat, namun hal ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem keuangan yang baik seperti audit rutin dan pelaporan publik (Bao, 2019). Keberhasilan otonomi daerah juga bergantung pada kapasitas administrasi lokal yang mencakup kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan layanan publik yang berkualitas, sehingga peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang profesional (Abidin, 2015). Selain itu, otonomi daerah memperkuat demokrasi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membuka peluang bagi kepemimpinan lokal yang inklusif dan berbasis kinerja untuk merancang strategi pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing.

2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal Berkelanjutan:

Pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam aspek ekonomi, fokus utama adalah menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sektor-sektor produktif lokal. Upaya ini sering

kali dilakukan melalui investasi pada infrastruktur dasar, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta penguatan daya saing daerah(Mustaqim, 2023). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan aspek sosial dan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan menekankan inklusivitas dan pengentasan kemiskinan dengan memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama yang rentan, melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat(Natalia & Maulidya, 2023). Selain itu, pembangunan harus memperhatikan konservasi sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan melalui kebijakan ekonomi hijau, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menghasilkan kebijakan komprehensif yang memenuhi kebutuhan lokal tanpa mengorbankan keberlanjutan, menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua pihak(Susila & Hukom, 2023).

B. Studi Empiris

Penelitian tentang otonomi daerah di Indonesia telah mengungkap dinamika kompleks yang melibatkan perlindungan hak masyarakat adat dan dampaknya pada pembangunan ekonomi di wilayah khusus. Dalam konteks hak atas tanah masyarakat adat, otonomi daerah menghadirkan peluang untuk memperkuat pengakuan hukum terhadap hak-hak mereka. Namun, kompleksitas kerangka hukum sering kali menjadi tantangan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika eksternal seperti perubahan iklim, ekspansi industri, dan tekanan politik lokal. Penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok, 2024) menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat.

Sementara itu, penelitian lain yang diteliti oleh (Lamere, 2024) mengenai kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua menunjukkan potensi signifikan otonomi daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir, PDRB Papua mengalami peningkatan yang nyata, disertai penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan, seperti praktik korupsi dan lemahnya pengawasan anggaran, yang sering kali menghambat distribusi manfaat Otsus secara merata. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak luas.

Dua penelitian ini memberikan wawasan yang saling melengkapi mengenai bagaimana otonomi daerah dapat menjadi alat strategis untuk pembangunan dan

kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang kuat, tantangan struktural dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, pendekatan yang lebih strategis dan kontekstual dapat dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah dalam Mendukung Ekonomi Lokal

Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola potensi dan sumber daya mereka secara mandiri, namun implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di banyak daerah, terutama daerah yang masih berkembang. Keterbatasan ini mencakup kurangnya tenaga ahli dalam bidang perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan yang efektif (Jamaluddin & Syahrin, 2024). Selain itu, kesenjangan infrastruktur antar wilayah menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan kesetaraan pembangunan ekonomi. Daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai sering kali kesulitan menarik investasi dan

mengembangkan sektor ekonomi lokal yang kompetitif(Mudhoffar & Magriasti, 2024).

Faktor lainnya adalah permasalahan tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Korupsi dan lemahnya pengawasan terhadap alokasi dana sering kali menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas program pembangunan ekonomi lokal yang dirancang oleh pemerintah daerah(Anggraini, 2024). Tantangan ini diperparah oleh ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mengurangi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara mandiri(Siburian dkk., 2021). Akibatnya, banyak daerah sulit mencapai kemandirian fiskal yang menjadi salah satu tujuan utama dari otonomi daerah.

Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing(Razak, 2023). Hal ini memungkinkan daerah untuk fokus pada pengembangan sektor unggulan lokal, seperti agribisnis, pariwisata, atau industri kreatif, yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat(Hayati, 2021). Selain itu, desentralisasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berbasis kebutuhan nyata di tingkat lokal.

Teknologi digital menjadi salah satu peluang besar dalam mendukung efektivitas otonomi daerah. Pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan(Robial dkk., 2023). Teknologi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan publik, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan menarik investasi melalui promosi potensi daerah yang lebih efektif(Astuty dkk., 2024). Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang ini secara optimal, otonomi

daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen

Keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal. Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang perencanaan, manajemen, dan eksekusi program pembangunan (Mirza & Aisyah, 2020). SDM yang kurang terlatih sering kali menjadi penghambat dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program-program yang efektif di tingkat daerah (Chairunnisa dkk., 2024). Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan pendidikan formal menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.

Manajemen keuangan daerah adalah faktor lain yang krusial. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dapat menentukan sejauh mana dana daerah digunakan untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, korupsi dan penyalahgunaan dana publik sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi otonomi daerah (Hatu dkk., 2024). Sistem pengawasan yang lemah memungkinkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, sehingga mengurangi dampak positif dari desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, penguatan mekanisme audit dan pelaporan keuangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana daerah.

Ketimpangan infrastruktur antar daerah juga memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan otonomi daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti akses transportasi, komunikasi, dan energi, cenderung lebih mampu menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sebaliknya, daerah dengan infrastruktur yang terbatas sering kali tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial (Rangkuti, 2024). Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengatasi ketimpangan ini dengan investasi yang merata dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Faktor politik lokal juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat mendorong kemajuan daerah secara signifikan (Noor, 2017). Sebaliknya, dinamika politik lokal yang diwarnai oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menghambat implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Stabilitas politik lokal, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif (Bakry dkk., 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah faktor lain yang tidak kalah penting. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih relevan dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Namun, di banyak daerah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi atau kurangnya mekanisme yang mendukung keterlibatan publik menjadi hambatan (Hakeu & Alim, 2024). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari proses pembangunan di era otonomi daerah.

C. Peluang Inovasi Kebijakan di Era Otonomi Daerah

Salah satu peluang terbesar dalam inovasi kebijakan di era otonomi daerah adalah penguatan kerja sama antar daerah. Melalui kolaborasi, daerah dapat berbagi sumber daya, teknologi, dan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan bersama (Awaludin, 2019). Misalnya, pengembangan kawasan industri atau ekonomi khusus yang melibatkan beberapa daerah dapat mendorong efisiensi dan memperkuat daya saing regional. Kerja sama ini juga memungkinkan daerah yang kurang berkembang untuk mendapatkan manfaat dari pengetahuan, pengalaman, dan infrastruktur yang dimiliki oleh daerah yang lebih maju, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah (Issundari & Yani, 2021).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang strategis lain dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi publik, seperti e-government, yang meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan data secara real-time, yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih berbasis bukti(Irawan, 2018). Dengan menggunakan teknologi, daerah juga dapat mempromosikan potensi lokal secara lebih efektif, seperti melalui platform digital untuk pariwisata, investasi, atau pemasaran produk lokal.

Peluang lain terletak pada inovasi dalam manajemen keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Inovasi ini juga mencakup penguatan peran masyarakat dalam pengawasan anggaran, seperti melalui aplikasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan dana(Sofianto, 2019). Dengan pengelolaan yang lebih baik, daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk program-program yang mendukung pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Era otonomi daerah juga membuka peluang untuk menciptakan kebijakan berbasis keberlanjutan. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, atau perlindungan lingkungan, dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang(Raihansyah dkk., 2024). Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk menarik investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan yang inovatif dan berbasis teknologi, serta pendekatan kolaboratif, otonomi daerah memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah lokal untuk mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), ketimpangan infrastruktur, serta masalah tata kelola dan akuntabilitas menjadi hambatan utama. Korupsi dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat semakin memperumit upaya daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk manajemen anggaran yang transparan dan efektif, menjadi kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan manfaat desentralisasi.

Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah mereka, seperti pengembangan sektor unggulan lokal dan pemanfaatan teknologi digital. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola, tetapi juga membantu pemerintah daerah mempromosikan potensi lokal secara lebih luas dan menarik investasi. Dengan pendekatan berbasis bukti dan inovasi, daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kerja sama antar daerah dan penerapan kebijakan berbasis keberlanjutan juga menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan otonomi daerah. Melalui kolaborasi, daerah dapat mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sumber daya, serta menciptakan daya saing yang lebih kuat di tingkat regional. Selain itu, fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penggunaan teknologi hijau dapat menarik investasi jangka panjang dan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan strategi yang holistik, otonomi daerah berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2015). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Anggraini, M. (2024). Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3), Article 3. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4826>
- Astuty, D. A., Maharani, P. N., Triany, M., Pratama, A. A., Amanda, C. A., Tarigan, H. S., & Azri, N. I. (2024). Upaya Inovatif Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui Optimalisasi UMKM Opak di Desa Paya Bengkuang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1366–1373. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4071>
- Augustinah, F. (2019). Manajemen Kinerja Balanced Scorecard Untuk Koperasi Dan UMKM. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi*, 2(2), 219–235. <https://doi.org/10.25139/jai.v2i2.1125>
- Awaludin, L. (2019). STRATEGI PENGUATAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI&KOMUNIKASI (TIK) DALAM MENGOPTIMALKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bao, B. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM. *DINAMIS*, 16(2), Article 2.
- Chairunnisa, A., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN BREBES. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), Article 4. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47210>

- Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2024). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.303>
- Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Mohuyula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024>
- Hatu, R. A., Ibrahim, R., Bumulo, S., & Adahati, F. S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. *Dynamics of Rural Society Journal*, 2(1, January), Article 1, January. <https://doi.org/10.37905/drsj.v2i1.47>
- Hayati, K. (2021). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI SINERGISITAS DENGAN BUMDES DAN DESA PINTAR (SMART VILLAGE). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)*, 170–182. <https://doi.org/10.23960/jbm.v17i3.417>
- Irawan, A. (2018). SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35724/sjias.v7i01.967>
- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL DAERAH. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>
- Jamaluddin, J., & Syahrin, M. N. A. (2024). Studi Komparasi Implementasi dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3349>
- Lamere, M. (2024). Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua. *ournal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 240–247.

- Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.18>
- Mubarok, A. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)*, Vol. 1(2), 69–77.
- Mudhoffar, K., & Magriasti, L. (2024). Ekonomi Politik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1382>
- Mustaqim, D. A. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>
- Nasrum, M. (2018). *Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah (Konsep Kebijakan dan Implementasinya)*. INA-Rxiv Papers. <https://doi.org/10.31227/osf.io/usk7w>
- Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–41. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513>
- Noor, M. (2017). Inovasi Dan Orientasi Baru Otonomi Daerah. *Mimbar Administrasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.56444/mia.v12i17.568>
- Proborini Hastuti, -. (2018). DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA : Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784–799.
- Rahman, D. A., Abubakar, M. bin, Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber

- Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), Article 3.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Raihansyah, M. Z., Varadista, V. V., Syahiny, H. C., Kahva, A. N. F., & Radianto, D. O. (2024). BISNIS MARITIM: DEFINISI, KONSEP, MANAJEMEN DAN PEMAHAMAN DALAM RUANG LINGKUP EKONOMI BIRU. *Inovasi Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), Article 2.
<https://journalpedia.com/1/index.php/ieb/article/view/1398>
- Rangkuti, Z. (2024). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Literacy Notes*, 2(1), Article 1.
<http://liternote.com/index.php/ln/article/view/196>
- Razak, A. (2023). Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 315–332. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656>
- Rizqi, K. F., Nuris, S. A., & Hayat, A. (2024). PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35314>
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patirol, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4293–4302.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11695>
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), Article 1.
<https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131>
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1–26.

<https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>

Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>

Sukma, D. (2007). *Demokratisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Terhadap Konsep Good Financial Governance di Kabupaten Sukamara)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32068>

Susila, W., & Hukom, A. (2023). Potensi Implementasi Green Economy Di Kalimantan Tengah. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 239–248. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.908>

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>